

## PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI PADA SKPK BANDA ACEH)

Mulya Irzan\*<sup>1</sup>, Syukriy Abdullah\*<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala  
e-mail: syukriya@gmail.com\*<sup>2</sup>

### Abstrak

*The purpose of this research is to test participation effect in arranging budgets, decentralization structure, and information technology for managerial performance (studies in work unit set in Banda Aceh). Population in this research is the work unit set of Banda Aceh. Total populations are 38 SKPK (76 respondents). The methodology of this research is using questioner. The result of this research is to show that partially and simultaneously, participation in arranging budget, decentralization structure and information technology affect managerial performance.*

**Keywords:** *performance managerial, participation in arranging budget, decentralization structure, and information technology.*

### 1. Pendahuluan

Pada dasarnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintah daerah yakni ketidakefektifan, inefisiensi dan *private inurement* (penggunaan dana untuk kepentingan pribadi). Hal tersebut karena tidak adanya mekanisme dasar pertanggungjawaban yang baku seperti organisasi bisnis. Organisasi sektor publik tidak mengenal kepemilikan (*self interest*) yang dapat memaksa pencapaian tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi (Bangun, 2009).

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah, diantaranya adalah sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah. Hal ini mencakup proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Bangun, 2009). Menurut Suhardini et al. (2014) penyebab rendahnya kinerja pemerintah daerah karena masih banyaknya titipan kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural maupun anggota DPRD yang menyebabkan proses penganggaran daerah selalu saja mengalami keterlambatan dalam pengesahan APBD karena adanya tarik ulur dalam pembahasan anggaran. Serapan anggaran belanja merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah.

Serapan anggaran belanja adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanjanya (Abdullah, et al., 2015).

Kinerja merupakan bagian yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun non bisnis. Untuk mencapai kinerja organisasi yang baik diperlukan kemampuan dan bakat yang tinggi oleh setiap individu yang terlibat didalamnya, serta usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu, keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari peran manajer didalamnya, karena manajer merupakan individu yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, salah satu ukuran keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari kinerja manajerialnya (Nengsy et al., 2013).

Penyusunan anggaran merupakan hal yang rutin setiap tahun sebelum memasuki tahun anggaran berkenaan dilakukan oleh satuan kerja/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Mardiasmo (2009:61) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika

perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Diperkirakan tidak satupun akademisi maupun praktisi di bidang bisnis termasuk akuntansi yang menolak pernyataan bahwa tingkat atau intensitas partisipasi anggaran dan derajat struktur organisasi yang terdesentralisasi akan meningkatkan atau menurunkan kinerja orang yang terlibat dalam partisipasi dan struktur tersebut (Hidayat, 2015). Struktur organisasi desentralisasi secara umum ditunjukkan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih terdesentralisasi (Hidayat, 2015).

Desentralisasi menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administrative.

Pesatnya kemajuan teknologi ini menjadikan teknologi sebagai bagian dari suatu pendukung berbagai aktivitas bagi para akademisi, pebisnis, profesional maupun pada kalangan birokrasi. Diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi ataupun pengaplikasian suatu sistem informasi, baik individu maupun organisasi dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien (Dewi dan Mimba, 2014). Dalam mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, pemerintah terus berupa menciptakan atau membuat regulasi dan juga alat bantu yang akan membantu para pegawai pemerintah dalam bekerja. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Agustiani (2010) menyatakan bahwa pencapaian kinerja individual berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam organisasi. Ellyana et al. (2009) juga mengemukakan bahwa agar suatu sistem informasi dan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja individual maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dengan tepat dan harus mempunyai kecocokan dengan tugas yang didukungnya.

Penelitian ini menguji pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Struktur Desentralisasi, dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial. Objek yang digunakan oleh peneliti adalah para pimpinan SKPK dan juga Kepala Bidang Program atau Kepala Sub Bagian Program pada setiap SKPK yang ada di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Struktur Desentralisasi dan, Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh)”**.

## 2 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS Kinerja Manajerial

Menurut Harefa (2007) pengertian kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan. Sedarmayanti (2004) dalam Afrida (2013) mengemukakan bahwa kinerja manajerial pemerintahan daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur instansi tersebut.

### **Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran**

Sumarno (2005) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran merupakan tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Konsep dasar partisipasi penyusunan anggaran di pemerintah daerah adalah ketika seseorang individu terlibat didalam proses penyusunan anggaran yang melalui beberapa tahap. Tahapan penyusunan anggaran itu dimulai dengan penjarangan aspirasi masyarakat yang kemudian akan dibahas di Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan (Bangun, 2009).

### **Struktur Desentralisasi**

Secara formal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun defenisini desentralisasi menurut Mulyadi (2001:379) adalah pendelegasian kebebasan untuk mengambil keputusan. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2000:64) desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada yang lebih rendah.

### **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi menurut Negara (2015) adalah setiap teknologi yang bisa membantu manusia untuk membuat dan memproses data menjadi informasi. Menurut O'brien (2005:6) teknologi informasi terdiri dari teknologi perangkat keras, teknologi perangkat lunak, teknologi *network* telekomunikasi, dan teknologi manajemen sumber data. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan, yang dikenal dengan sebutan e-government, diyakini akan memberikan keuntungan yang luas, tidak saja bagi negara dan para penyelenggaranya, tetapi juga bagi publik yang menerima layanan (Hoesin et al., 2008).

### **Penelitian Terdahulu**

#### **Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Daerah**

Penelitian Suhardini et al. (2014) menggunakan responden 96 orang yang terdiri dari 20 orang Tim Teknis Penyusunan APBD Provinsi Riau dan 76 orang pejabat eselon IV dari total populasi sebanyak 351 orang yang terdiri dari 20 Tim Teknis Penyusunan

APBD dan 331 pejabat eselon IV di 38 SKPD Provinsi Riau. Model penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian Suhardini et al. (2014) ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja manajerial.

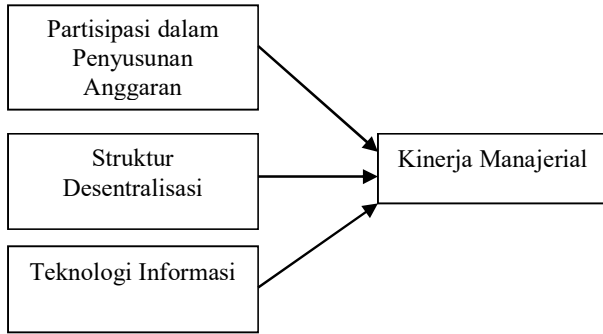
Penelitian Bangun (2009) dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Dari total 53 SKPD, yang menjadi sampel adalah sebanyak 31 SKPD. Dengan responden sebanyak 2 orang dari masing-masing SKPD yakni Kepala SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada para responden. Dengan model penelitian adalah model regresi linear berganda dan analisis regresi bertingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

#### **Struktur Desentralisasi pada Pemerintah Daerah**

Penelitian Hidayat (2015) yang dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan 77 orang responden yang berasal dari unsur pimpinan, pejabat pengelolaan keuangan dan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) dimana penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

#### **Teknologi Informasi**

Penelitian yang dilakukan Simorangkir (2013) di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan jumlah sampel sebanyak 56 orang dari total populasi sebanyak 59 orang karyawan yang dalam level manajerial yang meliputi Asisten Kepala Biro, Asisten Manajer, Asister Senior Manajer, Kepala Biro, Manajer, dan Manajer Senior. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan kuesioner. Model analisis data dengan cara menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara Simultan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Manajerial.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

### Perumusan Hipotesis

- H1 : Partisipasi dalam penyusunan anggaran, struktur desentralisasi dan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
- H2 : Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
- H3 : Struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
- H4 : Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

## 3 METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Terdapat enam aspek dasar desain penelitian, yaitu tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, konteks studi, unit analisis, dan horizon waktu studi. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengujian hipotesis. Jenis investigasi dalam penelitian ini yaitu studi kausalitas. Kausalitas adalah studi yang dilakukan untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Penelitian menggunakan tingkat intervensi minimal dan situasi studi tidak diatur. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006:155).

### Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK yang ada di pemerintahan Kota Banda Aceh yang 38 SKPK dan tiap SKPK diwakili oleh 2 orang sebagai responden yakni kepala dinas/kepala sekretariat dan kabid program/kasubbag program pada setiap SKPK. Pengumpulan data dilakukan secara

langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan. Jumlah berdasarkan populasi sebanyak 38 SKPK yang diwakili oleh 2 orang yakni kepala dinas/sekretaris dan kasubbag program dari tiap SKPD adalah 76 responden.

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan kuesioner. Pendistribusian kuesioner akan dilakukan dengan mengantar langsung kepada setiap responden.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

dimana:

Y	= Kinerja Manajerial
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran
$X_2$	= Struktur Desentralisasi
$X_3$	= Teknologi Informasi
e	= Error

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini untuk menguji apakah data berdistribusi normal digunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Jika  $p > 0,05$  maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya  $< 0,05$  maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel bebas tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antarvariabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai batas yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,1$  atau nilai VIF  $\geq 10$  (Ghozali, 2013:105).

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak muncul heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika terdapat pola tertentu maka terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola tertentu atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

**Rancangan Pengujian Hipotesis**

**Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui dan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) pada tingkat signifikansi 5%. Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

**Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (secara parsial). Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% maka dapat

disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, dan keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Uji asumsi klasik yang pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas data melalui analisis statistik dengan melakukan uji statistik *nonparametric one sample kolmogorov-smirnov*.

Uji asumsi klasik pertama dilakukan adalah uji normalitas data. Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan pengujian normalitas.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,89694851
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari *output* di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp.Sig 2-tailed*) sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ), maka nilai residual tersebut telah normal.

**Hasil Uji Multikolonieritas**

Untuk menguji apakah model regresi mengalami korelasi antar variabel independennya, maka diperlukan pengujian multikolonieritas. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami kolerasi antar variabel independennya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10 maka terjadi

multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013:106). Selanjutnya disajikan Tabel 4.2 untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas.

**Tabel 4.2**  
**Uji Multikolonieritas**

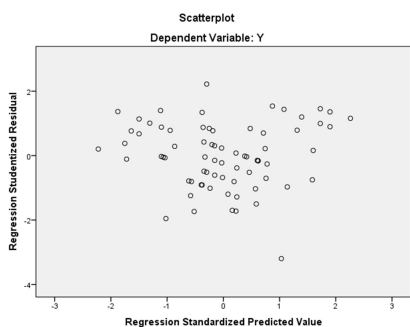
Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,944	,056		
X1	2,635	,010	,497	2,014
X2	6,461	,000	,803	1,245
X3	6,079	,000	,589	1,699

Sumber: Data Diolah (2017)

Nilai *Tolerance* untuk semua variabel bebas berada diatas 0,10, serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) variabel bebas tidak ada yang diatas 10. Dengan demikian data disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar-residual tidak heterogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik *scatterplot* dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, sehingga menghasilkan data seperti yang terlihat pada Gambar di bawah.



**Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan grafik di atas yang menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

**Model Persamaan Regresi Linear Berganda**

Untuk dapat mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakanlah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat program *SPSS versi 23.0*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran ( $X_1$ ), struktur desentralisasi ( $X_2$ ), dan teknologi informasi ( $X_3$ ). Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja manajerial ( $Y$ ). Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.2

$$Y = 2,838 + 0,293X_1 + 0,344X_2 + 0,460X_3 + \epsilon$$

t Value	konstanta	$X_1$	$X_2$	$X_3$
		1,944	2,635	6,461
Sig. Value	0,056	0,010	0,000	0,000
F Value/ Sig. F	69,048 / 0,000			
R / R <sup>2</sup> / Adj. R <sup>2</sup>	0,861 / 0,742 / 0,731			

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari persamaan regresi pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa konstanta adalah sebesar ( $a=2,838$ ). Artinya jika faktor partisipasi dalam penyusunan anggaran ( $X_1$ ), struktur desentralisasi ( $X_2$ ), dan teknologi informasi ( $X_3$ ) dianggap konstan, maka besarnya kinerja manajerial pada SKPK di Banda Aceh adalah sebesar 2,838.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran ( $X_1$ ) sebesar 0,293. Artinya setiap ada peningkatan sebesar satu pada variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja manajerial pada SKPK di Banda Aceh sebesar 29,3 %. Koefisien regresi struktur desentralisasi ( $X_2$ ) sebesar 0,344. Artinya setiap ada peningkatan sebesar satu pada variabel struktur desentralisasi, maka secara relatif akan meningkatkan struktur desentralisasi pada SKPK di Banda Aceh sebesar 34,4 %. Koefisien regresi teknologi informasi ( $X_3$ ) sebesar 0,460. Artinya setiap ada peningkatan sebesar satu pada variabel teknologi informasi, maka secara relatif akan

meningkatkan kinerja manajerial pada SKPK di Banda Aceh sebesar 46 %.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Hasil Pengujian Secara Simultan (F)

Pengujian secara simultan atau uji F dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, stuktur desentralisasi dan teknologi informasi bersama-sama terhadap kinerja manajerial pada SKPK di Banda Aceh. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan 5% menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. F tabel dalam penelitian ini yang menggunakan sebanyak 76 responden adalah 2,72. Hasil pengujian secara simultan dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Pada Tabel 4.10, dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 69,048, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,72. Hal ini menunjukkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran ( $X_1$ ), struktur desentralisasi ( $X_2$ ), dan teknologi informasi ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Y) pada SKPK di Pemerintahan Banda Aceh.

Koefisien korelasi (R) pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,861, ini menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 86,18 %. Artinya kinerja manajerial pada SKPK di Banda Aceh ada hubungannya dengan faktor-faktor partisipasi dalam penyusunan anggaran ( $X_1$ ), struktur desentralisasi ( $X_2$ ), dan teknologi informasi ( $X_3$ ).

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai  $R^2$  adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2013:97). Nilai  $R^2$  untuk regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 0,742, yang artinya bahwa sebesar 74,2 % perubahan kinerja manajerial dipengaruhi oleh variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran ( $X_1$ ), struktur desentralisasi ( $X_2$ ), dan teknologi informasi ( $X_3$ ).

### Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t dan Nilai Signifikansi)

#### Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja

##### Manajerial

Nilai  $t_{hitung}$  variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah sebesar 2,635, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,9917. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa untuk variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial tidak dapat ditolak, karena nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan  $t_{tabel}$  adalah  $2,635 > 1,9917$ . Artinya, partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial dengan pengaruh positif.

Jika dilihat dari nilai signifikansi (sig.) variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, yakni 0,010 dibandingkan dengan 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

#### Pengaruh Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial

Nilai  $t_{hitung}$  struktur desentralisasi adalah sebesar 6,461, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,9917. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa untuk variabel struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial tidak dapat ditolak, karena  $6,461 > 1,9908$ . Artinya, struktur desentralisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Jika dilihat dari nilai signifikansi (sig.) variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, yakni 0,010 dibandingkan dengan 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

#### Pengaruh Teknologi Informasi dalam Kinerja Manajerial

Nilai  $t_{hitung}$  teknologi informasi 6,079, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,9917. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa untuk variabel teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial tidak dapat ditolak, karena  $6,079 > 1,9917$ . Artinya, teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Jika dilihat dari nilai signifikansi (sig.) variabel teknologi informasi, yakni 0,000 dibandingkan dengan

0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

### **Pembahasan Hasil Penelitian** **Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Struktur Desentralisasi, dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial**

Berdasarkan pengujian statistik F yang telah dilakukan menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 69,048, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,72. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama, yakni variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, struktur desentralisasi dan kinerja manajerial berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPK Banda Aceh. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama ( $H_1$ ).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardini et al. (2014) dimana, nilai  $F_{hitung}$  penelitiannya sebesar 165,019 lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yakni 2,470.

Hasil uji koefisiensi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,861 atau sebesar 86,1% dan nilai  $R^2$  yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,742 atau 74,2%. Hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi penelitian ini juga tidak berbeda jauh perolehan nilai R dan  $R^2$  dengan penelitian suhardini et al. (2014) dimana nilai R yang diperoleh dalam penelitiannya adalah sebesar 0,934 atau 93,4% dan nilai  $R^2$  sebesar 0,867 atau 86,7%.

### **Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) dan juga Suhardini et al. (2014) yang juga menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial.

Sinambela (2003) dalam Hermaningsih (2009) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja manajerial perlu diterapkan penganggaran partisipatif. Hal ini agar para anggota organisasi memiliki motivasi yang besar untuk mencapai tujuan organisasinya. Sejalan dengan yang disampaikan Bangun (2009) yang menyatakan bahwa sukses atau gagalnya para staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran

merupakan suatu refleksi langsung terhadap keberhasilan ataupun kegagalan manajerial dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

Secara keseluruhan, persepsi responden tentang partisipasi dalam penyusunan anggaran di SKPK Banda Aceh sudah bagus. Ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata untuk variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran sebesar 3,79. Hal yang demikian tidak terlepas dari banyaknya masukan dan keterlibat para pegawai dalam proses penyusunan anggaran di SKPK. Keterlibatan para pegawai di SKPK seperti pada saat penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, para pegawai banyak memberi masukan mengenai rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai.

### **Pengaruh Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur desentralisasi akan mempengaruhi kinerja manajerial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bangun (2009) dan Hidayat (2015) yang menyatakan variabel struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Ini sejalan dengan penelitian Bangun (2009) dalam menyatakan bahwa secara umum struktur organisasi desentralisasi ditunjukkan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya pendelegasinya wewenang dalam pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut dalam hal ini SKPD di dalam pemerintahan, maka pihak pejabat SKPD tersebut memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam organisasi yang dipimpinnya.

Pihak pejabat SKPD tersebut akan menggunakan wewenang tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan stuktur desentralisasi di pemerintahan Kota Banda Aceh sudah memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata persepsi para responden terhadap struktur desentralisasi sebesar 3,90.

Struktur desentralisasi di SKPK Banda Aceh sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setiap pegawai SKPK telah mengetahui dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal. Ini ditandai dengan tingginya jawaban setuju dan sangat setuju untuk item pernyataan yang berkaitan dengan variabel ini. Salah satu bentuk struktur desentralisasi yang terjadi di



SKPK Banda Aceh adalah pembagian tugas yang jelas dalam organisasinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal tanggungjawab.

### **Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simongkir (2013) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja manajerial dapat dijelaskan dengan beberapa argumentasi. Pertama, teknologi informasi mempercepat proses penyelesaian aktivitas manajerial. Kedua, teknologi informasi meningkatkan akurasi dalam pencapaian target. Ketiga, meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Keempat, teknologi informasi dapat membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping karena telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Kelima, teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas informasi dan juga dapat mengolah data dengan cepat dan akurat.

Penggunaan teknologi informasi di Pemerintahan Banda Aceh sudah memadai. Hal ini ditandai dengan nilai rata-rata untuk persepsi responden tentang teknologi informasi adalah sebesar 3,75. Untuk meningkatkan kinerja, pemerintah daerah telah menyediakan perangkat-perangkat teknologi informasi yang memadai. Seperti ketersediaan komputer ataupun perangkat keras lainnya yang sudah sesuai dengan kebutuhannya ada. Juga ketersediaan jaringan internet untuk menunjang kinerja di SKPK Banda Aceh yang tersedia dengan layak. Disamping itu, juga tersedianya SDM yang handal dalam hal pengelolaan teknologi informasi di setiap instansi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Secara simultan, partisipasi dalam penyusunan anggaran, struktur desentralisasi dan teknologi

informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPK Banda Aceh.

- 2) Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPK Banda Aceh.
- 3) Struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPK Banda Aceh.
- 4) Teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPK Banda Aceh.

### **Saran**

#### **Saran untuk Pengembangan Teori**

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang ada, peneliti memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dimaksud adalah:

- 1) Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya, seperti memperbaiki item-item pertanyaan dalam kuesioner atau penggunaan indikator yang berbeda untuk pengukuran setiap variabel.
- 2) Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kinerja manajerial seperti budaya organisasi ataupun kejelasan sasaran anggaran.
- 3) Mengganti teknik pengumpulan data dari kuesioner menjadi wawancara ataupun teknik lainnya demi meminimalisir permasalahan subjektivitas dan keseriusan responden.

#### **Saran untuk Praktisi**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah, khususnya pemerintah kota Banda Aceh agar dapat memperhatikan kualitas kerjanya. Pada keterlibatan penyusunan anggaran agar dilibatkan secara lebih maksimal lagi semua pihak yang mempunyai kepentingan. Dan juga peningkatan sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi informasi yang tersedia instansi-instansi tempat bekerja. Misalnya dengan melaksakan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada pegawai yang membidangi bagian teknologi informasi agar kedepannya teknologi informasi akan lebih maksimal lagi penggunaannya sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih baik dan juga dengan begitu akan meningkatkan kinerja manajerialnya.

**Daftar Pustaka**

- Abdullah, S., R. Darma dan H. Basri. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Makalah ini dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) Tahun 2015.
- Afrida, Nur. 2013. Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang). *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Agustiani, N.H. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu) terhadap Kinerja Individual dengan Kemudahan Penggunaan sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Bangun, Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Dewi, Ratna Ayu P. & Ni Putu Sri Harta Mimba. 2014. Pengaruh Eferktifitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 8 No. 3: 442-357.
- Ellyana, D.D, Achyar Redy & Ardi Hamzah. 2009. Variabel Anteseden dan Konsekuensi Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 6 No. 1: 71-88.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen, Don R. & Maryanne M. Mowen. 2000. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Kedua. Terjemahan A. Hermawan. Jakarta: Erlangga.
- Harefa, Kornelius. 2007. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Komunikasi Organisasi sebagai Variabel Moderating pada PDAM Tirta Nadi. *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Hermaningsih. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak). *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Taufik. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan *Locus of Control* terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntabilitas*. Vol. 8 No. 2: 148-161.
- Hoesin, hanif, Herald Setiadi, Nurjannah Andi Lemmung, Prima A. Tonandriv & Abdulloh. 2008. *Penilaian Situs Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung*. Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta 2 Mei.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen (Konsep, Manfaat dan Rekayasa)*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Negara, I Gusti Bagus Surya. 2015. Toward Implementation of Accrual Basis in Indonesia Government: Key Success Factors. *GSTF Journal on Business Review (GBR)*. Vol.4 No.1: 44-50.
- Nengsy, H., Ria Nelly & Restu Agusti. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Job Relevan Information (JRI), Kepuasan Kerja dan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 1:1-17.
- O'Brien, A. James. 2005. *Introduction to Information Systems*. New York: McGraw-Hill.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business. Metode Penelitian untuk Bisnis*.

- Buku 1. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Simongkir, Enda Noviyanti. 2013. Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Reward terhadap Kinerja Manajerial dengan Total Quality Management sebagai Variabel Moderating pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Suhardini, Mila, Kamaliah & M. Rasuli. 2014. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan Sistem Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi*. Vol. 22 No. 3: 123-139.
- Sumarno, J. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta). *Jurnal SNA*. Vol.8: 586-616.